

KEBIJAKAN DAN REALITAS : IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PRESPEKTIF PIMPINAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Ahmad Fajrul Falah¹, Muhammad Thohir², Mardiyah³

faizfajrul04@gmail.com¹, muhammadthohir@uinsa.ac.id², ummi.mardiyah@uinsa.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Artikel ini meneliti tentang kebijakan dan realitas Implementasi Kurikulum Merdeka dalam perspektif Pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan memberikan fleksibilitas pembelajaran, mendorong diferensiasi, serta memperkuat kompetensi peserta didik agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Untuk memastikan kebijakan tersebut bisa diterapkan maka perlu adanya peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan yang mempunyai wewenang untuk menerapkannya secara merata dan sesuai dengan kebutuhan wilayah, terutama Kabupaten Sidoarjo sebagai subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kebijakan dan strategi yang dirumuskan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk diterapkan dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan di wilayahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo aktif dalam berbagai aspek mulai dari sosialisasi kebijakan, pelatihan guru terkait pembelajaran berdiferensiasi dan digitalisasi, hingga pendampingan sekolah serta monitoring dan evaluasi berbasis data.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kurikulum Merdeka, Dispendikbud Sidoarjo.

ABSTRACT

This article examines the policy and reality of the Implementation of the Independent Curriculum from the perspective of the Leadership of the Sidoarjo Regency Education and Culture Office. The Independent Curriculum is a national education policy that aims to provide learning flexibility, encourage differentiation, and strengthen students' competencies to be more adaptive to changing times. To ensure that the policy can be implemented, it is necessary to have the role of the local government, especially the Education Office which has the authority to implement it evenly and in accordance with the needs of the region, especially Sidoarjo Regency as the subject of this research. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The goal is to analyze how the policies and strategies formulated by the Sidoarjo Regency Education Office are to be applied in supporting the success of the Independent Curriculum in educational units in their area. The results of the study show that the Sidoarjo Regency Education Office is active in various aspects ranging from policy socialization, teacher training related to differentiated learning and digitalization, school assistance and data-based monitoring and evaluation.

Keywords: Education Policy, Implementation of the Independent Curriculum, Dispendikbud Sidoarjo.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, sangat bergantung pada mutu pendidikan yang diselenggarakan.¹ Pendidikan di Indonesia tidak hanya

¹Siti Lestariningsih dan T. Rohmadi, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Era Kurikulum Merdeka* (Surabaya: Unesa University Press, 2024).

berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, pengembangan potensi individu, serta jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa melakukan transformasi dan pembaruan kurikulum agar selalu relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta dinamika global yang terus bergerak cepat.²

Salah satu bentuk kebijakan strategis yang diluncurkan pemerintah adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dipandang sebagai inovasi penting untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran sekaligus mendekatkan praktik pendidikan dengan kebutuhan nyata peserta didik. Melalui kurikulum ini, guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, mengakomodasi perbedaan kemampuan, dan mendorong penguatan profil pelajar Pancasila sebagai arah pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka juga berusaha mengurangi beban administratif guru yang selama ini sering menjadi hambatan kreativitas, sehingga fokus utama kembali pada esensi pembelajaran, yaitu membentuk generasi yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.³

Akan tetapi, implementasi kurikulum baru tidak pernah sederhana. Sebuah kebijakan pendidikan tidak cukup hanya diatur di tingkat pusat, melainkan harus diterjemahkan secara nyata di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi sangat penting. Dinas Pendidikan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai penggerak, fasilitator, serta katalisator perubahan yang memastikan kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan.⁴ Tanpa adanya strategi yang jelas dan dukungan dari level daerah, Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi wacana di atas kertas, bukan perubahan yang dirasakan di ruang kelas.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Perbedaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadikan implementasi Kurikulum Merdeka di daerah ini menuntut strategi yang tidak bisa disamaratakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memikul tanggung jawab besar untuk menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lokal.⁵ Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan dan realitas implementasi Kurikulum Merdeka dalam perspektif pimpinan Dinas Pendidikan setempat memiliki urgensi yang tinggi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang Kurikulum Merdeka. Beberapa kajian menekankan bahwa kurikulum ini hadir untuk menjawab kebutuhan diferensiasi pembelajaran di sekolah, membangun

²Eka Paramita, Aminullah, dan Desi Ratnasari, "Transformasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia* 5, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.976>.

³Suci Setyaningsih dan Wiryanto, "Peran Guru Sebagai Aplikator Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Belajar," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 4 (2022): 3041-3052, <https://doi.org/10.58258/jime.v8i4.4095>.

⁴Sri Prilmayanti Awaluddin et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat," *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 01 (2024): <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4168>.

⁵Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 2022. *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.

keaktivitas peserta didik, dan memperkuat pembelajaran berbasis proyek.⁶ Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada tataran praktik di kelas dan pengalaman guru dalam menerapkan paradigma baru. Penelitian lain menyoroti kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi digital dan menyesuaikan strategi. Sementara kajian yang berbeda menunjukkan adanya ketimpangan pelaksanaan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan akibat keterbatasan sarana, akses internet, dan kualitas tenaga pendidik.⁷

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa masih terdapat ruang kosong dalam kajian akademik mengenai implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya yang berhubungan dengan strategi kebijakan di tingkat daerah. Padahal, peran pimpinan Dinas Pendidikan dalam merumuskan langkah-langkah konkret, menyusun program pelatihan, mengadakan pendampingan sekolah, serta melakukan monitoring dan evaluasi sangat menentukan keberhasilan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian yang menyoroti aspek kebijakan daerah, seperti yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, dapat memberikan perspektif baru yang melengkapi hasil penelitian sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui penelitian ini dapat diketahui strategi-strategi apa saja yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara merata, meskipun dihadapkan pada tantangan yang beragam. Lebih jauh, penelitian ini juga berusaha menggali realitas di lapangan, baik berupa keberhasilan maupun hambatan yang muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif kebijakan, tetapi juga menghadirkan gambaran nyata bagaimana sebuah inovasi pendidikan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah-sekolah.

Kontribusi penelitian ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai implementasi kurikulum dengan menghadirkan sudut pandang baru, yakni peran kebijakan daerah sebagai penghubung antara regulasi nasional dan praktik lokal. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi akademisi yang ingin mengkaji hubungan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan pendidikan. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Sidoarjo, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan dalam menyempurnakan kebijakan Kurikulum Merdeka agar lebih adaptif terhadap realitas di lapangan.

Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, melalui strategi sosialisasi kebijakan, pelatihan guru, pendampingan sekolah, pemanfaatan teknologi digital, serta monitoring dan evaluasi berbasis data, telah berupaya untuk mewujudkan tujuan kurikulum ini. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan sarana prasarana, keterbatasan kompetensi guru, dan kurangnya keterlibatan masyarakat, masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan nasional dijalankan di tingkat

⁶Ayu Mustika Sari, Dadan Suryana, Alwen Benti, dan Ridwan Ridwan, "Efektifitas Model Project Based Learning (PjBL) dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Taman Kanak-Kanak," *Jurnal Basicedu* 7, no. 1 (2023): 432–440, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4390>.

⁷Widya Monica Sianipar et al., "Analisis Kesenjangan Pendidikan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan Berbasis Kurikulum Merdeka," *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 20, no. 2 (2025): <https://doi.org/10.55558/al-ihda.v20i2.296>.

daerah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi rujukan bagi praktik pendidikan yang lebih baik di masa depan. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka, sehingga transformasi pendidikan di Indonesia benar-benar berjalan menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan kebijakan dan realitas implementasi Kurikulum Merdeka dalam perspektif pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan, dan studi dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh saling melengkapi.⁹ Analisis data dilakukan dengan model interaktif *Miles dan Huberman* yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sidoarjo diawali dengan proses sosialisasi yang terstruktur dan menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). Sosialisasi ini penting karena menjadi tahap awal dalam memastikan setiap pemangku kepentingan pendidikan memahami arah, tujuan, serta strategi pelaksanaan kebijakan. Dispendikbud Sidoarjo melibatkan kepala sekolah, guru, pengawas, hingga komite sekolah dalam forum-forum resmi seperti rapat koordinasi, workshop, dan seminar pendidikan. Melalui sosialisasi ini, kebijakan pemerintah pusat terkait fleksibilitas pembelajaran, penguatan diferensiasi, serta pengembangan Profil Pelajar Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam praktik nyata di sekolah.

Upaya ini sejalan dengan pendapat *Mulyasa* yang menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi dan sosialisasi kepada para pelaksana di tingkat lapangan.¹¹ Jika guru dan kepala sekolah tidak memahami arah kebijakan, maka implementasi akan berjalan parsial dan tidak menyentuh substansi pembaruan. Oleh karena itu, Dispendikbud Sidoarjo memastikan bahwa proses sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif, dengan memberi ruang diskusi dan tanya jawab.

Di sisi lain, tantangan dalam sosialisasi kebijakan juga cukup kompleks, terutama karena adanya keberagaman kesiapan sekolah di Sidoarjo. Sekolah perkotaan relatif lebih cepat memahami konsep Kurikulum Merdeka dibanding sekolah di wilayah pinggiran. Namun, Dispendikbud merespons kesenjangan ini dengan strategi jemput bola, misalnya mengadakan sosialisasi di berbagai kecamatan sehingga akses informasi lebih merata. Langkah ini memperlihatkan bahwa Dispendikbud tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang menjamin kesetaraan informasi.¹²

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

⁹I. Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

¹⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994).

¹¹E. Mulyasa, *Pengembangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022).

¹²Rozaqiyah Puspita Sari, Rasianna Br. Saragih, dan Yuliati, "Strategi Komunikasi dalam Implementasi Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Sekolah Dasar Sekolah Alam Bengkulu Mahira)," *Jurnal Kaganga : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 79-87, <https://doi.org/10.33369/jkaganga.5.1.79-87>.

Dengan demikian, sosialisasi kebijakan di Kabupaten Sidoarjo dapat dipandang sebagai praktik nyata dari teori implementasi kebijakan menurut *Grindle*, yang menekankan pentingnya komunikasi intensif, sumber daya yang memadai, dan konsistensi kebijakan agar program berjalan sesuai sasaran.¹³

2. Pelatihan Guru: Pembelajaran Berdiferensiasi dan Digitalisasi

Aspek kedua yang menjadi sorotan adalah program pelatihan guru. Dispendikbud Sidoarjo secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk memperkuat kompetensi guru dalam dua aspek utama: pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu roh Kurikulum Merdeka yang menuntut guru menyesuaikan metode, materi, dan evaluasi sesuai kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Dalam konteks Sidoarjo, pelatihan berdiferensiasi dilaksanakan melalui workshop tematik, in-house training, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan pendidikan. Pelatihan ini dirancang agar guru tidak hanya memahami teori, tetapi juga mempraktikkan rancangan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing.

Sejalan dengan itu, Dispendikbud juga menekankan digitalisasi pendidikan. Pandemi Covid-19 telah membuka mata bahwa literasi digital guru merupakan kebutuhan mutlak. Karena itu, pelatihan terkait pemanfaatan Learning Management System (LMS), media pembelajaran digital, dan aplikasi interaktif diperkuat sebagai bagian dari kebijakan daerah. Digitalisasi dalam pendidikan bukan sekadar tren, tetapi strategi transformasi yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterhubungan antar pemangku kepentingan.¹⁴

Efektivitas pelatihan di Sidoarjo terlihat dari meningkatnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran sehari-hari, serta semakin banyaknya praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang dilaporkan ke Dispendikbud. Namun, tantangan tetap ada, khususnya pada guru senior yang relatif lambat beradaptasi dengan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, Dispendikbud menerapkan pendekatan *peer learning*, di mana guru yang lebih adaptif mendampingi guru lain secara berkelanjutan.¹⁵

Kebijakan pelatihan guru ini dapat dikaitkan dengan konsep *capacity building* yang diungkapkan oleh *Grindle*, yakni penguatan kapasitas individu dan organisasi untuk mampu melaksanakan kebijakan dengan efektif.¹⁶ Dalam hal ini, penguatan kapasitas guru di Sidoarjo menjadi kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat kelas.

3. Pendampingan Satuan Pendidikan

Selain sosialisasi dan pelatihan, Dispendikbud Sidoarjo juga fokus pada pendampingan satuan pendidikan. Pendampingan dilakukan agar sekolah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, tetapi mendapatkan arahan, supervisi, dan motivasi dari dinas. Bentuk pendampingan antara lain supervisi

¹³Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980).

¹⁴Jadhika Dwi Amrullah, Ferry Budi Prasetya, Ayu Sayyidatina Rahma, Anjar Dwi Setyorini, dan Amanda Nabila Salsabila, "Efektivitas Peran Kurikulum Merdeka terhadap Tantangan Revolusi Industri 4.0 bagi Generasi Alpha," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia* 4, no. 4 (2023): 1-12, <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.754>.

¹⁵Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).

¹⁶Merilee S. Grindle, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries* (Boston: Harvard University Press, 1997).

akademik oleh pengawas sekolah, kunjungan lapangan ke sekolah, serta penyediaan forum konsultasi daring dan luring.

Pendampingan ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama* memastikan sekolah memahami regulasi. *Kedua* memberikan solusi terhadap kendala yang muncul. Misalnya, sekolah yang mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar atau proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) akan mendapat bimbingan teknis dari pengawas dan tim kurikulum Dispendikbud.

Kegiatan pendampingan ini sejalan dengan pandangan *Fattah* bahwa pengawasan dan supervisi pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan profesional guru dan kepala sekolah. Dengan adanya pendampingan, sekolah di Sidoarjo merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah (KOS) berbasis Kurikulum Merdeka.¹⁷

Selain itu, pendampingan juga membuka ruang kolaborasi antar sekolah. Dispendikbud sering memfasilitasi pertemuan kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk berbagi praktik baik. Hal ini memperkuat gagasan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat berjalan secara individualistik, tetapi membutuhkan ekosistem kolaboratif.¹⁸

Dengan demikian, pendampingan satuan pendidikan di Sidoarjo memperlihatkan bahwa Dispendikbud memainkan peran sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga membina dan memberdayakan sekolah.

4. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Aspek terakhir yang menjadi fokus penelitian adalah monitoring dan evaluasi (monev) berbasis data. Dispendikbud Sidoarjo menyadari bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka harus diukur secara objektif melalui data yang terukur. Oleh karena itu, mereka mengembangkan sistem monitoring yang melibatkan laporan rutin dari sekolah, observasi lapangan, serta analisis capaian pembelajaran berbasis indikator kinerja.

Monev berbasis data memungkinkan Dispendikbud mengetahui sejauh mana sekolah telah melaksanakan kurikulum sesuai prinsip-prinsip kebijakan nasional. Data yang dikumpulkan mencakup penggunaan modul ajar, keterlibatan guru dalam pelatihan, implementasi proyek P5, hingga hasil asesmen diagnostik dan formatif. Analisis data ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Menurut *Patton*, evaluasi berbasis data merupakan salah satu pendekatan penting dalam *utilization-focused evaluation* (evaluasi yang berfokus pada pemanfaatan), di mana data evaluasi tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program.¹⁹ Hal ini tampak nyata di Sidoarjo, di mana hasil monitoring digunakan untuk menyusun program pelatihan lanjutan, memberikan penghargaan bagi sekolah berprestasi, serta merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah.

Namun, tantangan monev di Sidoarjo juga tidak sederhana. Beberapa sekolah masih mengalami kendala dalam melaporkan data secara konsisten dan akurat. Untuk mengatasinya, Dispendikbud menyediakan aplikasi pelaporan daring dan mengadakan

¹⁷Nanang Fattah, *Supervisi Pendidikan: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

¹⁸Nur Elifianita Susanti, Aprilia Iva Swastika, Abid Musthofa, Fendi Irawan, dan Indah Wahyu Puji Utami, "Kolaborasi Antar Mata Pelajaran dalam Model Sistem Blok sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka di SMKN 10 Malang," *Jurnal MIPA dan Pembelajarannya* 4, no. 8 (2023): <https://doi.org/10.17977/um067v4i8p5>.

¹⁹Michael Q. Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002).

pelatihan administrasi digital. Langkah ini memperkuat kualitas data yang dikumpulkan dan memastikan transparansi dalam evaluasi.

Monitoring dan evaluasi berbasis data yang dilakukan Dispendikbud Sidoarjo memperlihatkan implementasi prinsip *evidence-based policy* (kebijakan yang didasarkan pada bukti) sebagaimana ditegaskan oleh Davies, bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus bertumpu pada data dan bukti empiris, bukan sekadar asumsi.²⁰ Dengan demikian, monitoring di Sidoarjo tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sidoarjo berjalan aktif dan dinamis berkat peran sentral Dispendikbud dalam empat aspek utama. *Pertama*, sosialisasi kebijakan. *Kedua*, pelatihan guru. *Ketiga*, pendampingan sekolah. *Keempat*, monitoring dan evaluasi berbasis data. Keempat aspek ini saling melengkapi dan membentuk siklus implementasi kebijakan yang berkesinambungan.

Jika dianalisis dari perspektif teori implementasi kebijakan, maka praktik yang dilakukan di Sidoarjo mencerminkan model implementasi top-down sekaligus bottom-up. Dari sisi top-down, kebijakan pusat diturunkan ke daerah melalui regulasi dan sosialisasi. Dari sisi bottom-up, sekolah diberi ruang inovasi melalui pendampingan dan evaluasi yang adaptif. Sinergi kedua pendekatan ini menjadikan implementasi Kurikulum Merdeka lebih kontekstual dengan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di Sidoarjo tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan nasional, tetapi juga oleh kapasitas, strategi, dan komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik nyata.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menekankan kesetaraan hak serta kesempatan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Dalam penerapannya, pendidikan inklusif di era modern masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kompetensi pendidik, rendahnya keterlibatan orang tua, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, terdapat potensi besar untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Dukungan regulasi pemerintah, kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peningkatan profesionalisme tenaga pendidik menjadi elemen penting yang mendorong terwujudnya praktik pendidikan inklusif yang efektif. Melalui kerja sama antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat, pendidikan inklusif diharapkan dapat berperan dalam membentuk generasi yang toleran, empatik, serta menghargai keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Al Faruq, A. K. S. (2025). Analisis Potensi Kolaborasi Dosen PGSD dan Guru SLB dalam Penerapan Teknologi Pendidikan Adaptif. *Journal of Education for All*, 3(2), 94–101. <https://doi.org/10.61692/edufa.v3i2.321>
- Biantoro, O. F. (2024). Pendidikan Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1697>

²⁰H. T. O. Davies, *What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services* (Bristol: The Policy Press, 2004).

- Heldanita, H. (2018). Konsep Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 16–24. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-02>
- Ita, E. (2019). Konsep Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 6(2), 186–195. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551972>
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Alifa Miftahkhul Jannah dkk, Model Layanan Pendidikan Inklusif Di Indonesia, Vol. 1, *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2021, hal 126-128. *ANWARUL : Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 1, 121–136. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul>
- Marwantoro, T., Nugroho, R. R., & Liviana, S. (2024). Analisis Penelitian Pengaruh Program Pendidikan Profesi Guru Terhadap Profesionalitas Guru dalam Proses Pembelajaran. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3), 1579–1586. <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.92129>
- Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan Inklusif Di Tingkat Sekolah Dasar: Konsep, Implementasi, dan Strategi. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 9(1), 9–18.
- Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). 14072-39141-1-Pb. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 8(2008), 11–22.
- Silaban, L., & Handayani Damanik, S. (2025). Analisis Peran Guru Dalam Pendidikan Inklusif di TK Mandiri Plus Lubuk Pakam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2024), 1659–1666. <https://jpion.org/index.php/jpi1659> Situswebjurnal: <https://jpion.org/index.php/jpi>
- Yuninda, W., & N, L. (2019). Analisis Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran K13 Pada Tema 1 Subtema 3 Kelas Iv Sdn 181 Pekanbaru. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(1), 66. <https://doi.org/10.33578/jpfkip.v8i1.6407>.